



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

2024

TAHUNAN AUDITED

LAPORAN KEUANGAN



Oleh :

Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Jl. Airport Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta,
Kab. Badung-Bali



bali@otoritasbandara.info

**KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
WILAYAH IV**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 (*Audited*)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badung, 7 Mei 2025

Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



CECEP KURNIAWAN

NIP. 19690127 199603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	61



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung – Bali 80361

Telepon: 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website: <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Badung, 7 Mei 2025

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV ↑



Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1 002



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.085.444.583,00 atau mencapai 140,90 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.609.350.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.030.764.742,00 atau mencapai 94,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp47.446.212.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp99.776.155.925,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp179.891.024,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp99.410.339.501,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp185.925.400,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp185.925.400,00 dan Rp99.590.230.525,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.955.273.083,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp47.585.304.592,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp42.630.031.509,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp39.105.000,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp42.590.926.509,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp102.235.836.875,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp42.590.926.509,00 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp39.945.320.159,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp99.590.230.525,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.609.350.000	5.085.444.583	140,90	4.960.239.688
JUMLAH PENDAPATAN		3.609.350.000	5.085.444.583	140,90	4.960.239.688
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	17.937.467.000	17.937.027.975	100,00	14.170.237.965
Belanja Barang	B.4	25.164.707.000	22.760.216.707	90,44	21.834.746.505
Belanja Modal	B.5	4.344.038.000	4.333.520.060	99,76	92.174.400
JUMLAH BELANJA		47.446.212.000	45.030.764.742	94,91	36.097.158.870

II. NERACA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	179.891.024	343.035.494
Jumlah Aset Lancar		179.891.024	343.035.494
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	72.050.805.432	73.000.216.651
Gedung dan Bangunan	C.16	102.005.296.172	98.510.220.312
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	762.176.275	762.176.275
Aset Tetap Lainnya	C.18	24.145.000	126.182.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(75.432.083.378)	(70.324.135.878)
Jumlah Aset Tetap		99.410.339.501	102.074.659.360
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	6.719.162.550	6.719.162.550
Aset Lain-Lain	C.22	185.925.400	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(6.719.162.550)	(6.719.162.550)
Jumlah Aset Lainnya		185.925.400	-
JUMLAH ASET		99.776.155.925	102.417.694.854
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	185.925.400	170.887.479
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	10.970.500
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		185.925.400	181.857.979
JUMLAH KEWAJIBAN		185.925.400	181.857.979
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	99.590.230.525	102.235.836.875
JUMLAH EKUITAS		99.590.230.525	102.235.836.875
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		99.776.155.925	102.417.694.854

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.955.273.083	4.932.239.065
JUMLAH PENDAPATAN		4.955.273.083	4.932.239.065
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.880.157.852	14.227.108.088
Beban Persediaan	D.3	553.176.179	508.292.274
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.366.730.367	7.320.049.588
Beban Pemeliharaan	D.5	3.713.787.574	4.056.771.167
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.175.649.701	10.218.564.349
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.895.802.919	8.899.322.509
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		47.585.304.592	45.230.107.975
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(42.630.031.509)	(40.297.868.910)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(89.764.000)	25.349.999
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		12.273.000	27.999.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(102.037.000)	(2.650.000)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		128.869.000	624
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		129.094.600	624
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(225.600)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		39.105.000	25.350.623
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(42.590.926.509)	(40.272.518.287)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(42.590.926.509)	(40.272.518.287)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	102.235.836.875	111.371.435.980
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(42.590.926.509)	(40.272.518.287)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	39.945.320.159	31.136.919.182
EKUITAS AKHIR	E.5	99.590.230.525	102.235.836.875

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

14. Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
24. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
25. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor S-519/KPN.2201/2025 tanggal 15 April 2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Tahun 2024 Audited.

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta menjamin tersedianya pelayanan transportasi udara kepada masyarakat di wilayah kerja Bandar Udara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ditetapkanlah organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksana ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja.

b. Fungsi

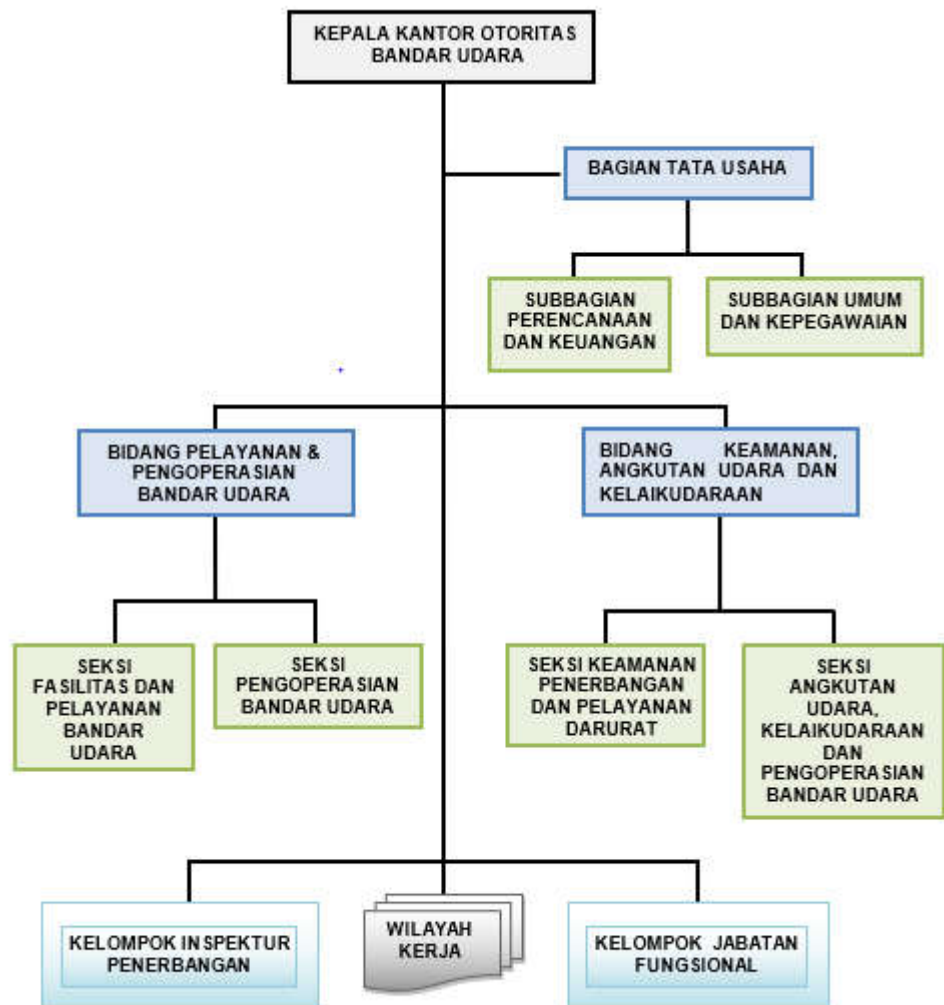
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;

- Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
 - Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- c. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV seperti yang terlihat di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

- a. Visi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan tugasnya yaitu: Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : “Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah kerja di Bali, NTT dan NTB;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten dengan instansi terkait;
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah kerja di Bali, NTT dan NTB;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Sasaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

- a. Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Indikator Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

- a. Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara;
- b. Persentase pemenuhan standar pelayanan Bandar Udara;
- c. Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara;
- d. Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan;
- e. Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan;
- f. Persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara;
- g. Persentase Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara
- h. Persentase pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul aset dan modul Akuntansi dan Pelaporan.

*Basis Akuntansi***A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas

pelaporan dari Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.609.350.000	3.609.350.000
Jumlah Pendapatan	3.609.350.000	3.609.350.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.522.379.000	17.937.467.000
Belanja Barang	25.859.645.000	25.164.707.000
Belanja Modal	3.123.000.000	4.344.038.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	42.505.024.000	47.446.212.000

Anggaran pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami keniakan sebesar Rp4.941.188.000,00 atau 11,62 persen dari anggaran awal. Jenis revisi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ Bulan Januari terdapat 2 (dua) kali revisi antara lain :
 - Revisi *Automatic Adjustment* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Revisi ini merupakan revisi pemblokiran anggaran belanja barang senilai Rp1.469.645.000,00;
 - Revisi administratif guna pemutahiran data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.001/0185/I/Otbwil.IV/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Usulan Revisi DIPA;
- ❖ Bulan Februari terdapat revisi DIPA guna pemutahiran Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA Triwulan I;
- ❖ Bulan April terdapat 2 (dua) kali revisi anggaran antaran lain :
 - Revisi DIPA guna pemutahiran Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA triwulan II sesuai Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.002/0769/IV/Otbwil.IV/2024 tanggal 01 April 2024 hal Usulan Revisi DIPA;

- Revisi DIPA guna penyesuaian perhitungan data dan transaksi IKPA untuk indikator deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP sesuai Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan Nomor : KU.201/1/5/STJ/2024 tanggal 26 Maret 2024 hal Kebijakan Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Pada Aplikasi OMSPAN Sehubungan Dengan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 dan Hari Besar Keagamaan (HBK) Idul Fitri 1445 Hijriyah.
- ❖ Bulan Mei terdapat 2 (dua) kali revisi sebagai berikut :
 - Revisi DIPA antar kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sesuai Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.002/0734/III/Otbwil.IV/2024 tanggal 26 Maret 2024 hal Usulan Revisi DIPA. Revisi ini merupakan perubahan dari belanja barang menjadi belanja modal senilai Rp1.221.038.000,00 berupa kegiatan Rehabilitasi Ruang Rapat Lantai 4 guna menunjang kegiatan rapat pimpinan pejabat tinggi dalam pembahasan event internasional yang akan diselenggarakan di Bali;
 - Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA triwulan II sesuai Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.002/1229/V/Otbwil.IV/2024 tanggal 29 Mei 2024 hal Usulan Revisi DIPA.
- ❖ Pada Juli terdapat revisi DIPA dalam rangka pemutahiran Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-1673/WPB.22/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-8 DIPA Petikan TA 2024 Satker 465663;
- ❖ Pada bulan Agustus terdapat 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu :
 - penambahan anggaran karena adanya kegiatan internasional yang diselenggarakan di Bali, antara lain :
 - *Asia-Africa ACR Conference* pada tanggal 8 s.d 11 Juli 2024;
 - Pertemuan ke-10 *Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting* (MCM) dan Pertemuan ke-5 *Sub-Regional Meeting* (SRM) on Counter Terrorism and Transnational Crime pada tanggal 30 Juli 2024;

- *Indonesia-Africa Forum (IAF)* pada tanggal 30 Agustus s.d 5 September 2024;
- *Bali International Air Show* pada tanggal 18 s.d 21 September 2024.

Penambahan anggaran sebesar Rp550.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp203.200.000,00 dan Belanja Sewa sebesar Rp346.800.000,00 sesuai Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.002/1294/VI/OtbWil.IV/2024 tanggal 5 Juni 2024 hal Permohonan Penambahan Anggaran Tahun 2024;

- Revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp13.868.621.000,00 sesuai Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : KU.001/1974/VIII/OtbWil.IV/2024 tanggal 15 Agustus 2024 hal Permohonan Penambahan Anggaran Belanja Pegawai.
- ❖ Pada bulan Oktober terdapat revisi DIPA berupa revisi untuk pergeseran sisa belanja modal rehabilitasi Gedung operasional menjadi belanja modal jaingan instalasi air bersih bangunan operasional sebesar Rp340.000.000,00 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KU.001/11/24/DJPU.Bagkeu-2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-8 TA. 2024;
- ❖ Pada bulan November terdapat revisi DIPA berupa penambahan belanja pegawai sebesar RpRp522.567.000,00 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-760/AG/AG.3/2024 tanggal 6 November 2024 hal Pengesahan Revisi Angaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan TA. 2024;
- ❖ Pada bulan Desember terdapat revisi DIPA berupa blokir pada anggaran perjalanan dinas sebesar Rp510.792.000,00 yang merupakan penghematan belanja perjalanan sesuai dengan Surat Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KU.003/1/5/DRJU-Bagkeu-2024 tanggal 13 November 2024 hal Surat Edaran Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara TA. 2024.

Realisasi Pendapatan
Rp5.085.444.583,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.085.444.583,00 atau mencapai 140,90 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.609.350.000,00. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.085.444.583,00. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.609.350.000	5.085.444.583	140,90
Jumlah	3.609.350.000	5.085.444.583	140,90

Perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Pajak	-	-	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.085.444.583	4.960.239.688	2,52
Jumlah	5.085.444.583	4.960.239.688	2,52

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp125.204.895,00 atau 2,52 persen dibandingkan 31 Desember 2023 yang dikarenakan oleh adanya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas hasil dari temuan audit BPK.

Rincian perbandingan PNBP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Perbandingan Rincian PNBPN per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.273.000	27.999.999	-56,17
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	59.072.583	63.924.065	-7,59
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	4.860.180.000	4.823.915.000	0,75
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	25.050.000	44.400.000	-43,58
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	624	29547,44
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	128.684.000	-	0,00
Jumlah	5.085.444.583	4.960.239.688	2,52

Penjelasan perbandingan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

- Terdapat penurunan pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp15.726.999,00 atau 56,17 yang disebabkan oleh pada tahun 2024 kuantitas penjualan Barang Milik Negara sebanyak 145 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 214 unit;
- Terjadi penurunan pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp4.851.482,00 atau 7,59 persen, hal ini disebabkan oleh penurunan nilai persetujuan sewa sebagian gedung yang digunakan untuk kantin dimana luas area yang disewakan menjadi lebih kecil dibandingkan tahun lalu sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor : S-56/MK.6/KNL.1401/2024 tanggal 16 April 2024 hal Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan yang Digunakan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dengan luas persetujuan sebesar 24 m2 nilai Rp15.958.000,00 sedangkan untuk tahun lalu seluas 33 m2 dengan nilai Rp21.941.000,00;

- Pendapatan jasa kebandarudaraan mengalami kenaikan sebesar Rp36.265.000,00 atau 0,75 persen yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari penerbitan ijin masuk (PAS) orang dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) kendaraan bandara;
- Penurunan juga terjadi pada pendapatan jasa transportasi lainnya sebesar Rp19.350.000,00 atau 43,58 persen yang disebabkan oleh menurunnya permohonan untuk penerbitan rekomendasi Kawasan Keselatanan Operasional Penerbangan (KKOP) dan pengajuan *Flight Approval* (FA);
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu merupakan Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai a.n Wayan Kertayasa karena yang bersangkutan menerima tunjangan struktural karena telah diangkat menjadi eselon IV;
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang menjadi temuan dari hasil audit BPK RI sesuai NTPN Nomor : 557883768502 tanggal pembayaran 31 Mei 2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Realisasi Belanja

Negara

Rp45.030.764.742,00

B.2 Belanja

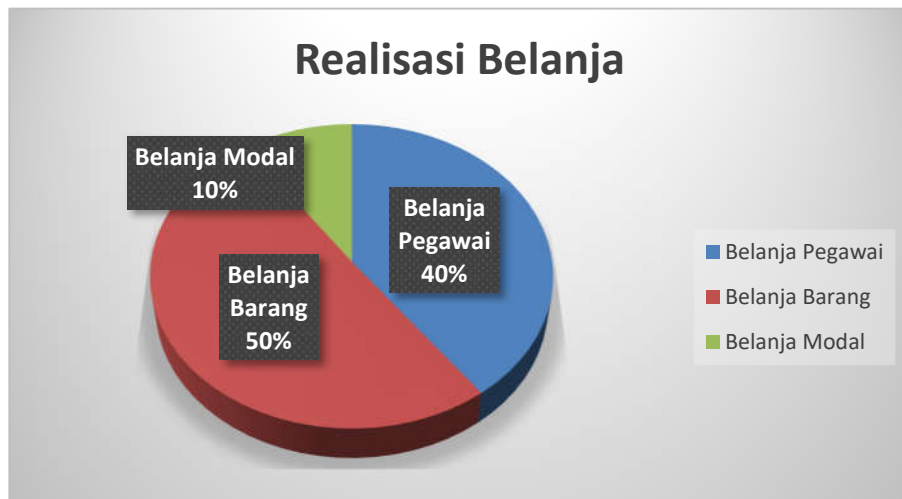
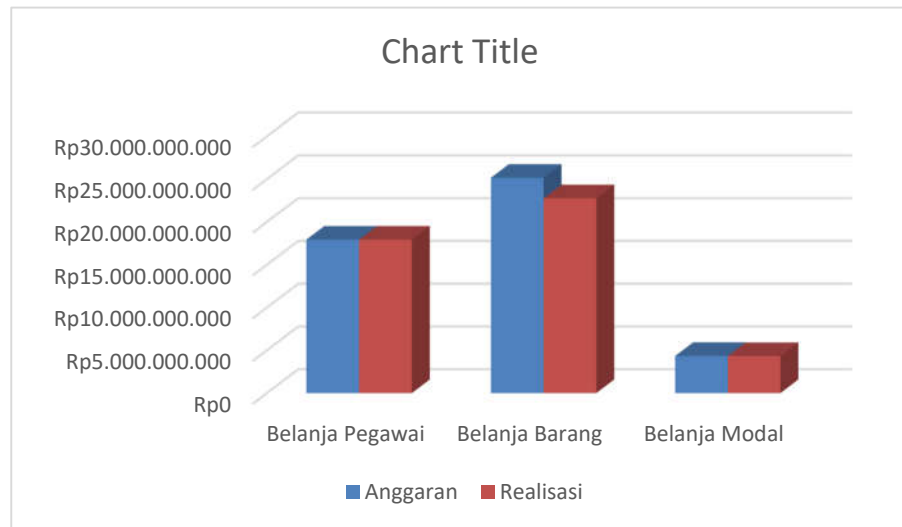
Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.030.764.742,00 atau 94,90 persen dari anggaran belanja sebesar Rp47.446.212.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.937.467.000	17.937.400.778	100,00
Belanja Barang	25.164.707.000	22.802.367.707	90,61
Belanja Modal	4.344.038.000	4.333.520.060	99,76
Total Belanja Kotor	47.446.212.000	45.073.288.545	95,00
Pengembalian Belanja		(42.523.803)	
Jumlah	47.446.212.000	45.030.764.742	94,91

Jenis Belanja pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja tertinggi terdapat pada Belanja pegawai yaitu 100 persen disusul dengan Belanja modal yaitu 99,76 persen dan Belanja barang yaitu 90,61 persen.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.933.605.872,00 atau 24,75 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada belanja pegawai berupa gaji pegawai sebesar 8 persen dan pengangkatan dari fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu serta ada kegiatan belanja modal berupa rehabilitasi rumah negara. Berikut rincian realisasi belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 :

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	17.937.027.975	14.170.237.965	26,58
Belanja Barang	22.760.216.707	21.834.746.505	4,24
Belanja Modal	4.333.520.060	92.174.400	4.601,44
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	45.030.764.742	36.097.158.870	24,75

*Belanja Pegawai**Rp13.684.479.392,00***B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.937.027.975,00 dan Rp14.170.237.965,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	5.603.710.100	4.489.530.500	24,82
Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.996	75.403	16,70
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361.880.860	316.234.966	14,43
Belanja Tunj. Anak PNS	105.252.932	93.238.680	12,89
Belanja Tunj. Struktural PNS	108.220.000	90.745.000	19,26
Belanja Tunj. Fungsional PNS	15.120.000	6.480.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	32.613.117	4.958.495	557,72
Belanja Tunj. Beras PNS	290.036.730	265.478.250	9,25
Belanja Uang Makan PNS	645.112.000	555.239.000	16,19
Belanja Tunjangan Umum PNS	275.650.000	237.500.000	16,06
Belanja Gaji Pokok PPPK	48.054.000	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	911	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.086.300	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	7.659.000	-	-
Belanja Uang Lembur	242.702.000	99.325.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	10.121.726.507	8.015.378.577	26,28
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	70.388.325	-	-
Jumlah Belanja Kotor	17.937.400.778	14.174.183.871	26,55
Pengembalian Belanja Pegawai	(372.803)	(3.945.906)	(90,55)
Jumlah Belanja	17.937.027.975	14.170.237.965	26,58

Dibandingkan dengan 31 Desember 2023 Belanja pegawai pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.766.790.010,00 atau sebesar 26,58 persen, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji untuk PNS sebesar 8 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain itu ada juga penambahan pegawai PPPK sebanyak 1 orang dan perpindahan jabatan dari fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 12 orang yang mengakibatkan kenaikan pada tunjangan kinerja pegawai bersangkutan sehingga berdampak pada belanja tunjangan kinerja serta terdapat juga pengangkatan dari CPNS menjadi PNS sebanyak 14 orang.

Belanja Barang

Rp22.760.216.707,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.760.216.707,00 dan Rp21.834.746.505,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp925.470.202,00 atau 4,24 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023, perbandingan belanja barang adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Barang

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.056.781.970	2.970.244.787	2,91
Belanja Barang Non Operasional	2.079.643.489	2.096.380.234	(0,80)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	390.073.445	353.418.875	10,37
Belanja Jasa	2.344.322.264	2.139.407.211	9,58
Belanja Pemeliharaan	3.713.745.838	4.056.731.049	(8,45)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.211.071.853	10.218.564.349	9,71
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.728.848	-	-
Jumlah Belanja Kotor	22.802.367.707	21.834.746.505	4,43
Pengembalian Belanja	-42.151.000	-	-
Jumlah Belanja	22.760.216.707	21.834.746.505	4,24

Peningkatan atau penurunan belanja barang per tanggal 31 Desember 2024 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Realisasi Belanja Barang Operasional mengalami kenaikan sebesar Rp86.537.183,00 atau sebesar 2,91 persen yang disebabkan karena adanya kenaikan upah untuk tenaga PPNP sesuai dengan kenaikan Upah minimum Regional (UMR) serta adanya realisasi lembur untuk PPNP yang menjalankan tugas FO pada hari libur;
- ❖ Belanja Barang Non Operasional Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp16.736.745,00 atau sebesar 0,80 persen yang disebabkan oleh menurunnya belanja honor output kegiatan yang diakibatkan karena honorarium kegiatan FO tidak dibayarkan lagi diganti dengan lembur. Selain itu ada juga peningkatan untuk belanja barang non operasional lainnya guna untuk mendukung kegiatan internasional seperti *Asia-Africa ACR Conference* pada tanggal 8 s.d 11 Juli 2024, Pertemuan ke-10 *Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM)* dan Pertemuan ke-5 *Sub-Regional Meeting (SRM) on Counter Terrorism and Transnational Crime* pada tanggal 30 Juli 2024, *Indonesia-Africa Forum (IAF)* pada tanggal 30 Agustus s.d 5 September 2024 dan *Bali International Air Show* pada tanggal 18 s.d 21 September 2024. Selain itu terdapat juga belanja untuk keperluan pendampingan dan/atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat tinggi guna persiapan kegiatan internasional.
- ❖ Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi mengalami kenaikan sebesar Rp36.654.570,00 atau 10,37 persen karena meningkatnya kebutuhan operasional komputer seperti tinta printer, flashdisk, keyboard, mouse dan lain sebagainya;
- ❖ Realisasi belanja jasa mengalami peningkatan sebesar Rp204.915.053,00 atau 9,58 persen yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi untuk belanja listrik karena pada tahun 2024 terdapat kenaikan tarif dasar listrik dari harga Rp1.522,88/kWh pada bulan Desember 2023 menjadi Rp1.699,53/kWh. Selain itu peningkatan juga terjadi pada belanja sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan isidentil seperti kunjungan kerja Menteri dan/atau pejabat tinggi;
- ❖ Belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp342.985.211,00 atau 8,45 persen disebabkan oleh menurunnya pemeliharaan Gedung dan bangunan karena realisasi untuk pemeliharaan rumah dinas yang dimana pada tahun 2024 terdapat

kegiatan rehabilitasi rumah dinas dengan mata anggaran belanja modal. Selain itu penurunan juga terdapat pada pemeliharaan peralatan dan mesin karena adanya penghapusan barang BMN berupa peralatan dan mesin pada tahun 2024;

- ❖ Realisasi belanja perjalanan dalam negeri mengalami peningkatan sebesar Rp992.507.504,00 atau 9,71 persen yang disebabkan oleh kenaikan pada belanja paket meeting luar kota karena Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang banyak melaksanakan kegiatan pengendalian seperti sosialisasi, bimtek dan rapat diluar kota akibat dari ramainya wisatawan yang memenuhi hotel di daerah Kabupaten Badung, maka kegiatan dilaksanakan diluar kota seperti Kabupaten Denpasar, Gianyar dan Klungkung;
- ❖ Belanja perjalanan dinas luar negeri berupa perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Kegiatan *Australia-Indonesia Knowledge Exchange-Empowering Women, Enhancing Aviation Security Outcomes* a.n. Ida Ayu Agung Indrayanthi Manuaba sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : KP.004/1323/VI/OTBWILIV/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Belanja Modal

Rp4.333.520.060,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.333.520.060,00 dan Rp92.174.400,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 4.601,44 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan oleh pada tahun 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional dan Beautifikasi Ruang Rapat Perbandingan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	838.444.200	92.174.400	809,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.495.075.860	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.333.520.060	92.174.400	4601,44
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.333.520.060	92.174.400	4601,44

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal tanah pada periode 31 Desember 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp838.444.200,00 terjadi kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp746.269.800,00 atau 809,63 persen yang disebabkan oleh pada tahun 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV memiliki kegiatan pengadaan printer cetak PAS dan peralatan multimedia sesuai SPK Nomor : 288/SPK-PTR/OTB.WIL.IV/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 senilai Rp191.719.200,00, Pengadaan Meubelair dan Kelengkapannya sesuai kontrak Nomor 411/KTK-MBL/OTB.WIL.IV/III/2024 tanggal 26 Agustus 2024 senilai Rp311.200.000,00, dan Pengadaan Peralatan Pengolah Data sesuai kontrak Nomor 719/KTK-PPD/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 senilai Rp335.525.000,00. Perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	838.444.200	92.174.400	809,63
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin			
Jumlah Belanja Kotor	838.444.200	92.174.400	809,63
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	838.444.200	92.174.400	809,63

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.495.075.860,00 dan Rp0. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp3.495.075.860,00 atau 100 persen yang disebabkan oleh pada tahun 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional dengan kontrak Nomor : 44/KTK-RBO/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan nilai sebesar Rp2.498.156.000,00, Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Operasional dengan SPK Nomor : 38/SPK-PRB/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 senilai Rp90.784.680,00 dan Beautifikasi Ruang Operasional sesuai kontrak Nomor 197/KTK-BRO/OTB.WIL.IV/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 senilai Rp906.135.180,00. Perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3.495.075.860		
Jumlah Belanja Kotor	3.495.075.860	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	3.495.075.860	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal lainnya TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tunai	-	-
Bank	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp179.891.024,00

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp179.891.024,00 dan Rp343.035.494,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	169.124.288	332.227.022
Bahan untuk Pemeliharaan	10.766.736	10.808.472
Jumlah	179.891.024	343.035.494

Seluruh persediaan pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Barang konsumsi sebesar Rp169.124.288,00 merupakan barang kebutuhan perkantoran seperti alat tulis kantor, kertas, tinta printer, odner dan lain sebagainya, sedangkan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp10.766.736,00 adalah bahan kimia untuk pembersih.

Peralatan dan Mesin

Rp72.050.805.432,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp72.050.805.432,00 dan Rp73.000.216.651,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	73.000.216.651
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	234.135.000
Pembelian	838.444.200
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(234.135.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.787.855.419)
Saldo akhir	72.050.805.432
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(65.278.361.651)
Nilai Buku	6.772.443.781

Mutasi dari Aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Mutasi Tambah

- Saldo Awal berupa P.C. Unit sebanyak 2 unit senilai Rp35.200.000,00, UPS 1 unit senilai Rp3.300.000,00, Kamera Digital 6.600.000,00, printer 1 unit senilai Rp118.525.000,00 dan Server 1 unit senilai Rp70.510.000,00. Transaksi ini terjadi akibat adanya aset yang tercatat gelondong sehingga dilakukan pencatatan sesuai dengan aset sebenarnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : BA 73 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2024;
- Pembelian berupa Sound System 2 unit senilai Rp34.965.000,00, Microphone 3 unit senilai Rp8.866.125,00, Wireless MIC 1 unit senilai Rp3.296.700,00, Lensa Kamera 1 unit senilai Rp13.098.000,00, LCD Monitor 1 unit senilai Rp26.085.000,00, Recorder 1 unit senilai Rp2.955.375,00, Kamera Digital 1 unit senilai Rp26.640.000,00, Tablet PC 1 unit senilai Rp20.535.000,00, Note Book 1 unit sebesar Rp16.650.000,00 dan Printer 1 unit senilai Rp38.628.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Pembelian Sofa sebanyak 4 set senilai Rp60.800.000,00, Kursi Besi/Metal 39 Buah senilai Rp250.400.000,00 sesuai dengan BAST pekerjaan Pengadaan Meubelair nomor 568/BAST-MBL/OTB.WIL.IV/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Selain itu terdapat juga pembelian berupa Printer 3 buah senilai Rp48.025.000,00, Lap Top 2 Buah senilai Rp30.000.000,00, Tablet PC 9 Buah senilai Rp143.100.000,00 dan P.C Unit 8 Buah Senilai Rp114.400.000,00 sesuai dengan BAST pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data nomor 768/BAST-PPD/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

➤ Mutasi kurang

- Koreksi Pencatatan berupa Mesin Barcode senilai Rp234.135.000,00 setelah dilakukan penelitian fisik dan administrasi maka ditemukenal aset tersebut merupakan aset gelondongan sehingga dilakukan koreksi pencatatan sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara Nomor : PL.201/2115/VIII/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- penghentian penggunaan merupakan aset yang tidak dipergunakan lagi dalam operasional pemerintah berupa peralatan penunjang operasional perkantoran seperti Tool kit, Smoke Tester, Altimeter, Penghancur kertas, LCD Projector, Alat penerjemah, Kursi, televisi, loudspeaker, sound system, mesin barcode, pesawat telephone, Komputer, Laptop, tablet, printer dan lain sebagainya sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Dari Kegiatan Operasional Nomor : PL.201/1137/V/OtbWil.IV/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan telah dilakukan penghapusan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP/85/IX/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan tanggal 2 September 2024.

Gedung dan
Bangunan

Rp102.005.296.172,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp102.005.296.172,00 dan Rp98.510.220.312,00. Mutasi terhadap Gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	98.510.220.312
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	2.588.940.680
Pengembangan Nilai Aset	906.135.180
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo Akhir	102.005.296.172
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(9.837.374.361)
Nilai Buku	92.167.921.811

Mutasi tambah pada aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Melalui KDP berupa kegiatan Rehabilitas Rumah Negara sebanyak 7 unit dari NUP 17 s.d. NUP 23 dengan nilai sebesar Rp2.498.156.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 430/BASTP-RBO/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 serta pekerjaan pengawasan sebesar Rp90.784.680,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 433/BADT-PRB/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024.
- Pengembangan Nilai Aset berupa kegiatan Beautifikasi Ruang Rapat Gedung Kantor senilai Rp906.135.180,00 yang dikapitalisasi kedalam Aset bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 4 sesuai dengan Surat Keterangan Pengembangan Nilai Aset Tetap Kuasa Pengguna Barang nomor KP.004/2953/XI/Otbwil.IV/2024 tanggal 28 November 2024

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp762.176.275,00*

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp762.176.275,00 dan Rp762.176.275,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	762.176.275
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo Akhir	762.176.275
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(295.997.366)
Nilai Buku	466.178.909

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan samapi dengan periode 31 Desember 2024.

Aset Tetap Lainnya
Rp24.145.000,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp24.145.000,00 dan Rp126.182.000,00. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya untuk 30 September 2024 disajikan pada tabel berikut :

Saldo Awal	126.182.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(102.037.000)
Saldo Akhir	24.145.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(20.350.000)
Nilai Buku	3.795.000

Mutasi kurang pada Aset Tetap lainnya merupakan penghentian aset dari penggunaan dimana aset tersebut tidak dapat digunakan lagi karena rusak berat seperti CD/VCD/DVD/LD 2 unit sebesar Rp3.960.000,00 dan Peta Digitas 1 unit sebesar Rp98.077.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Dari Kegiatan Operasional Nomor : PL.201/1137/V/OtbWil.IV/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan telah dihapuskan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP/85/IX/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan tanggal 2 September 2024.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi KDP dapat dilihat dari table berikut :

Saldo Awal	-
Mutasi tambah:	
Perolehan KDP	624.539.000
Pengembangan KDP	1.964.401.680
Perolehan Lainnya KDP	2.588.940.680
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan KDP	(2.588.940.680)
Reklasifikasi KDP Menjadi barang Jadi	(2.588.940.680)
Saldo Akhir	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku	-

- Perolehan KDP merupakan pembayaran termin pertama dari kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional sesuai Kontrak Nomor : 44/KTK-RBO/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 senilai Rp2.498.156.000,00;
- Pengembangan KDP merupakan pembayaran kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional tersebut di atas sebesar Rp1.873.617.000,00 dan kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Operasional sesuai SPK Nomor : 38/SPK-PRB/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 senilai Rp90.784.680.000,00;
- Koreksi pencatatan KDP terjadi akibat kesalahan kuantitas KDP yang seharusnya sebanyak 7 sedangkan tercatat hanya 1 sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan yang merupakan kegiatan Rehabilitasi Gedung Operasional termasuk pengawasan senilai Rp2.588.940.680,00 sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Nomor : PL.201/2353/IX/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 September 2024;
- Reklasifikasi KDP Menjadi barang Jadi berupa koreksi KDP tersebut di atas menjadi pengembangan KDP untuk rumah negara NUP 17 s.d 23 sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Nomor : PL.201/2353/IX/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 September 2024.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp75.432.083.378,00

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp75.432.083.378,00 dan Rp70.324.135.878,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	72.050.805.432	-65.278.361.651	6.772.443.781
2	Gedung dan Bangunan	1.102.005.296.172	-9.837.374.361	1.092.167.921.811
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	762.176.275	-295.997.366	466.178.909
4	Aset Tetap Lainnya	24.145.000	-20.350.000	3.795.000
Akumulasi Penyusutan		1.174.842.422.879	-75.432.083.378	1.099.410.339.501

Aset Tak Berwujud
Rp6.719.162.550

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp6.719.162.550,00 dan Rp6.719.162.550,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang terhadap Aset Tak Berwujud. Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Software Komputer	6.719.162.550
ATB Lainnya	0
	6.719.162.550

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada table berikut :

Saldo Awal	Rp	6.719.162.550
Mutasi tambah:		
pembelian		
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	6.719.162.550
Amortisasi	Rp	(6.719.162.550)
Nilai Buku	Rp	-

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp185.925.400,00*

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp185.925.400,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	185.925.400	-
		-
	185.925.400	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk belanja barang sebagai berikut :

- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Keamanan) senilai Rp40.535.100,00;

- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Alih Daya) senilai Rp21.584.000,00;
- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Kebersihan) senilai Rp63.206.300,00;
- Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet senilai Rp30.300.000,00;
- Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet Untuk Pelayanan Umum senilai Rp30.300.000,00.

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp6.719.162.550,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp6.719.162.550,00 dan Rp6.719.162.550,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud :			
Software	6.719.162.550	-6.719.162.550	0
Jumlah	6.719.162.550	-6.719.162.550	0

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp185.925.400,00

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp185.925.400,00 dan Rp170.887.479,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	185.925.400	Belanja barang berupa belanja pemeliharaan dan pengelolaan gedung dan bangunan (Jasa Keamanan, Kebersihan dan Alih Daya) dan langganan Internet yang pekerjaannya telah selesai 100% tanggal 31 Desember 2024 yang mana pembayarannya melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)
Total	185.925.400	

Pejelasan utang kepada pihak ketiga lainnya adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Keamanan) senilai Rp40.535.100,00 sesuai BAST nomor 908/BAST-PPGA/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Alih Daya) senilai Rp21.584.000,00 sesuai BAST nomor 911/BAST-PPGM/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- Belanja Barang Pemeliharaan dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jasa Kebersihan) senilai Rp63.206.300,00 sesuai BAST nomor 914/BAST-PPGB/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

- Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet senilai Rp30.300.000,00 sesuai BAST nomor 902/BAST-INK/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet Untuk Pelayanan Umum senilai Rp30.300.000,00 sesuai dengan BAST nomor 905/BAST-INP/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan rincian Utang Yang Belum Ditagihkan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Jumlah	-	-

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,00

C.15 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.970.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Ekuitas**Rp102.221.460.328,00***C.16 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp102.221.460.328,00 dan Rp102.235.836.875,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pendapatan PNB
Rp4.955.273.083,00

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.955.273.083,00 dan Rp4.932.239.065,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.043.083	63.924.065	9,57
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	4.860.180.000	4.823.915.000	0,75
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	25.050.000	44.400.000	(43,58)
Jumlah	4.955.273.083	4.932.239.065	0,47

- ❖ Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp6.119.018,00 atau 9,57 persen dari periode 31 Desember 2023 yang disebabkan oleh pada tahun 2023 terdapat sewa Sebagian Gedung kantor untuk kantin sebesar mulai dari bulan juni 2023 s/d juni 2024 Rp21.941.000,00 yang dimana setengah dari nilai sewa diakui sebagai pendapatan tahun 2024 sesuai dengan memo jurnal nomor KU.207/0006/II/Otbwil.IV/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- ❖ Pendapatan jasa kebandarudaraan mengalami penurunan sebesar Rp36.265.000,00 atau 0,75 persen dari periode pelaporan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari ijin masuk (PAS) orang dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) kendaraan bandara;
- ❖ Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp19.350.000,00 atau 43,58 persen yang disebabkan oleh turunnya permohonan untuk penerbitan rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi bandar Udara (KKOP) dan *Flight Approval* (FA).

Beban Pegawai
Rp17.880.157.852,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.880.157.852,00 dan Rp14.227.108.088,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.603.710.100	4.488.267.400	24,85
Beban Pembulatan Gaji PNS	85.193	74.111	14,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	361.880.860	316.108.656	14,48
Beban Tunj. Anak PNS	105.252.932	93.188.156	12,95
Beban Tunj. Struktural PNS	108.220.000	90.745.000	19,26
Beban Tunj. Fungsional PNS	15.120.000	6.480.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	32.613.117	4.958.495	557,72
Beban Tunj. Beras PNS	290.036.730	265.188.570	9,37
Beban Uang Makan PNS	600.227.000	600.124.000	0,02
Beban Tunjangan Umum PNS	275.280.000	235.285.000	17,00
Beban Gaji Pokok PPPK	48.054.000	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	911	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.086.300	-	-
Beban Uang Makan PPPK	7.659.000	-	-
Beban Uang Lembur	242.702.000	99.325.000	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10.109.741.384	8.027.363.700	25,94
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	70.388.325	-	-
Jumlah	17.880.157.852	14.227.108.088	25,68

Beban pegawai periode 30 September 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.653.049.764,00 atau 25,68 persen yang disebabkan oleh kenaikan gaji untuk PNS sebesar 8 persen pada tahun 2024 dan adanya penambahan pegawai PPPK. Selain itu juga terdapat pengangkatan dari CPNS menjadi PNS sebanyak 14 orang. Selain itu

juga terdapat perpindahan jabatan dari fungsional umum menjadi fungsional tertentu sebanyak 12 orang.

Beban Persediaan
Rp553.176.179,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp553.176.179,00 dan Rp508.292.274,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	553.176.179	508.292.274	8,83
Jumlah	553.176.179	508.292.274	8,83

Beban persediaan per tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp44.883.905,00 atau sebesar 8,83 persen yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan persediaan seperti Ribbon YMCKO 250 Image, HDP film dan HDP Full Colour untuk percetak PAS Bandara. Selain itu digitalisasi dokumen berdampak pada pengurangan pemakaian alat tulis kantor.

*Beban Barang
dan Jasa*
Rp7.366.730.367,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.366.730.367,00 dan Rp7.320.049.588,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.413.563.855	2.033.464.000	18,69
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	174.000	199.000	(12,56)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103.368.000	262.062.000	(60,56)
Beban Barang Operasional Lainnya	519.700.000	674.519.787	(22,95)
Beban Bahan	420.332.985	348.432.069	20,64
Beban Honor Output Kegiatan	592.800.000	1.009.710.000	(41,29)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.066.510.504	738.238.165	44,47
Beban Langganan Listrik	1.286.922.662	1.389.940.464	(7,41)
Beban Langganan Telepon	5.566.942	5.326.913	4,51
Beban Langganan Air	192.000	1.165.110	(83,52)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439.338.520	448.943.514	(2,14)
Beban Sewa	414.534.784	370.398.566	11,92
Beban Jasa Profesi	83.750.000	37.650.000	122,44
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19.976.115		0,00
Jumlah	7.366.730.367	7.320.049.588	0,64

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp46.680.779,00 atau sebesar 0,64 persen yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan sebesar Rp380.099.855,00 atau 18,69 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan Upah minimum Regional (UMR) pada penghasilan PPNPN di tahun 2024 dan peningkatan belanja untuk dukungan operasional satker;
- ❖ Beban Honor Operasional Satuan kerja mengalami penurunan sebesar Rp158.694.000,00 atau 60,56 persen yang disebabkan oleh kebijakan pembayaran honorarium hanya dapat dibayarkan 40 persen dari nilai maksimum yang tertuang pada Standar Biaya Masukan tahun 2024 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KU.001/2/16/SDJ.Bagkeu-2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- ❖ Beban Belanja Barang Operasional Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp154.819.787,00 atau 22,95 persen yang disebabkan oleh pada tahun 2024 langganan internet bulan desember 2024 dibayarkan melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dimana SP2D baru akan terbit pada bulan januari 2025;

- ❖ Beban Bahan mengalami kenaikan sebesar Rp71.900.916,00 atau 20,64 persen yang dikarenakan oleh kegiatan pengendalian lebih banyak tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sehingga belanja bahan untuk penunjang kegiatan tersebut juga mengalami kenaikan, belanja tersebut seperti pembuatan spanduk kegiatan, seminar kit, modul kegiatan dan lain sebagainya;
- ❖ Beban honor output kegiatan mengalami penurunan sebesar Rp416.910.000,00 atau 41,29 persen yang dikarenakan oleh adanya kebijakan kepala kantor yang menyatakan bahwa beberapa kegiatan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi maka dari itu honor output kegiatan tidak dapat diberikan secara penuh, adapun honor kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Honorarium Komite Fasilitas Bandara;
 - Honorarium Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
 - Honorarium Tim Kampanye Keselamatan Penerbangan.
- ❖ Beban barang non operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp328.272.339,00 atau 44,47 persen yang disebabkan oleh meningkatnya beban untuk kegiatan dukungan satker untuk kegiatan seperti *Asia-Africa ACR Conference* pada tanggal 8 s.d 11 Juli 2024, Pertemuan ke-10 *Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting* (MCM) dan Pertemuan ke-5 *Sub-Regional Meeting (SRM) on Counter Terrorism and Transnational Crime* pada tanggal 30 Juli 2024, *Indonesia-Africa Forum (IAF)* pada tanggal 30 Agustus s.d 5 September 2024 dan *Bali International Air Show* pada tanggal 18 s.d 21 September 2024. Selain itu terdapat juga belanja untuk keperluan pendampingan dan/atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat tinggi guna persiapan kegiatan internasional;
- ❖ Beban listrik mengalami penurunan sebesar Rp103.017.802,00 atau 7,41 persen yang disebabkan oleh beban Listrik pada bulan Januari 2024 diakui sebagai beban Listrik tahun 2023 melalui memo jurnal nomor KU.207/0006/II/Otbwil.IV/2024 tanggal 2 Januari 2024;

- ❖ Beban sewa mengalami kenaikan sebesar Rp44.136.218,00 atau 11,92 persen yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan sewa kendaraan isidentil karena pendampingan atau kunjungan kerja setingkat Menteri atau Pejabat Tinggi;
- ❖ Beban jasa profesi mengalami kenaikan sebesar Rp46.100.000,00 atau 122,44 persen yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pengendalian pada periode sampai dengan september 2024 yang berpengaruh juga pada jumlah narasumber yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan tersebut.

Beban Pemeliharaan
Rp3.713.787.574,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.713.787.574,00 dan Rp4.056.771.167,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan *31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.189.482.280	2.301.344.021	(4,86)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	189.042.990	199.042.570	(5,02)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.335.220.568	1.507.182.458	(11,41)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	49.162.000	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	41.736	40.118	4,03
Jumlah	3.713.787.574	4.056.771.167	(8,45)

Beban pemeliharaan periode sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp342.983.593,00 atau 8,45 persen. Berikut adalah penyebab dari penurunan beban pemeliharaan :

- ❖ Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp111.861.741,00 atau 4,86 persen yang disebabkan oleh pada tahun 2024 anggaran untuk pemeliharaan

Gedung dan Bangunan dialokasikan untuk pemeliharaan peralatan;

- ❖ Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9.999.580,00 atau 5,02 persen yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan rumah operasional terbatas karena bersumber dari dana PNBPN dimana untuk melakukan realisasi diperlukan perhitungan MP PNBPN;
- ❖ Beban pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp171.961.890,00 atau 11,41 persen yang disebabkan oleh beberapa pemeliharaan Peralatan dan Mesin dialokasikan pada mata anggaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan seperti pemeliharaan Lift, AC, Fasilitas Pemadam Kebakaran, Mesin Pompa, Panel Listrik dan Fasilitas Peralatan.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp11.175.649.701,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.175.649.701,00 dan Rp10.218.564.346,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	8.157.715.033	7.018.543.149	16,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.730.000	399.900.000	- 22,55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.917.088.770	2.465.983.450	- 22,26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	784.387.050	334.137.750	134,75
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	6.728.848	0	0,00
Jumlah	11.175.649.701	10.218.564.349	9,37

Beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp957.085.352,00 atau 9,37 persen yang disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas paket

meeting luar kota karena kurang tersedianya paket meeting dan akomodasi hotel pada daerah Kabupaten Badung karena ramainya wisatawan dari luar pulau bali, maka dari itu kegiatan sosialisasi dan bimtek banyak dilaksanakan diluar kota seperti Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Denpasar.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp6.895.802.919,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.895.802.919,00 dan Rp8.899.322.509,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.832.472.283	6.832.497.284	-29,27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.046.380.040	2.017.793.630	1,42
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	32.081.000	-100,00
Beban Penyusutan Irigasi	7.137.780	7.137.780	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	9.812.816	9.812.815	0,00
Jumlah	6.895.802.919	8.899.322.509	-22,51

*Surplus (Defisit)
Penjualan aset Non
Lancar
(Rp89.764.000,00)*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp89.764.000,00) dan Rp25.349.999,00. Rincian surplus (defisit) penjualan aset non lancar adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(102.037.000)	(2.650.000)	-
Pendapatan Perolehan Lainnya	12.273.000	27.999.999	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-89.764.000	25.349.999	-454,10

Beban kerugian pelepasan aset berasal dari nilai buku sisa dari barang berupa CD/VCD/DVD/LD 2 unit sebesar Rp3.960.000,00 dan Peta Digital 1 unit sebesar Rp98.077.000,00 sesuai persetujuan Nomor : PL.405/3/21/PHB/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Sedangkan Pendapatan Perolehan Lainnya berasal dari penjualan Barang Milik Negara melalui lelang sesuai NTPN Nomor : B0FAA6U8EUPMRDR9 tanggal 8 Agustus 2024.

*Surplus (defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp128.869.000,00*

D.9 Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp128.869.000,00 dan Rp624,00.

Rincian Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	624	29547,44
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	128.684.000	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	225.600	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	- 225.600	-	-
Jumlah	128.869.000	624	20.651.983,3

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Penerimaan kembali beban pegawai tahun anggaran yang lalu bersal dari Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai a.n Wayan Kertayasa karena yang bersangkutan menerima tunjangan struktural karena telah diangkat menjadi eselon IV;
- ❖ Penerimaan kembali beban barang tahun anggaran yang lau merupakan pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang menjadi temuan dari hasil audit BPK RI;
- ❖ Pendapatan penyesuaian nilai persediaan dan beban penyesuaian nilai persediaan merupakan kesalahan perekaman operator komitmen dimana pada barang persediaan yang berupa Cutter L.500 dan Gunting Tanggung direkam dengan nilai masing-masing Rp450.400,00 dan Rp576.000,00 yang seharusnya Cutter L.500 Rp576.000,00 dan Gunting Tanggung Rp450.400,00 maka modul persediaan melakukan koreksi nilai terhadap barang persediaan tersebut agar sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
Jumlah	0	0	

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS***Ekuitas Awal******Rp102.235.836.875,00*****E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp102.235.836.875,00 dan Rp111.371.435.980,00.

Defisit LO***Rp42.590.926.509,00*****E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp42.590.926.509,00 dan Rp40.272.518.287,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai***Aset******Rp0,00*****E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Selisih Revaluasi***Aset Tetap******Rp0,00*****E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap***Non Revaluasi******Rp0,00*****E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar***Entitas******Rp39.945.320.159,00*****E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.945.320.159,00 dan Rp31.136.919.182,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas

yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.085.444.583)
Ditagikan ke Entitas Lain	45.030.764.742
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	39.945.320.159

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp45.030.764.742,00 sedangkan DDEL sebesar (Rp5.085.444.583,00).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
	Jumlah		-

Ekuitas Akhir

Rp99.590.230.525,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp99.590.230.525,00 dan Rp102.235.836.875,00.

G. **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**1. **Pengelola Anggaran**

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ditetapkan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cecep Kuniawan	Kepala Kantor	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Risdiyono	Pengumpul dan Pengolah data Laporan	Pejabat Pembuat Komitmen
3	I Kadek Agus Suryawan	Pengelola Anggaran	Penandatanganan dan Penguji SPM
4	Yuyun Novita Wulandari	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5	Ni Made Dewi Adnyani	Bendahara	Bendahara Penerimaan

Sesuai Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK 8315 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KP/178/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2023 dan Menunjuk/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2024 Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

2. **Pengungkapan Lainnya**

- a. Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp370.000,00 pada Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran a.n I Wayan Kerta Yasa karena yang bersangkutan diangkat menjadi eselon IV periode bulan Januari s/d Februari 2024;
- b. Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp42.151.000,00 pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) yang disebabkan oleh *double* rekam pertanggungjawaban pada bendahara dan telah dilakukan pengembalian sesuai dengan NTPN 412416QT9MCPIHMT tanggal bayar 30 Desember 2024;

c. Penjelasan terkait UP/TUP per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- Sisa UP sumber Dana RM senilai Rp300.000.000,00 dengan SPM GUP Nihil nomor 00526A tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp82.398.520,00 Sehingga nilai sisa UP yang harus disetor senilai Rp217.601.480,00 menggunakan Akun 815111 sesuai NTPN 4D269522A1A3IFKU tanggal bayar 31 Desember 2024;
- Sisa TUP sumber Dana RM Senilai Rp455.771.537,00 dengan SPM PTUP Nihil nomor 00525A tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp454.790.873,00 Sehingga nilai Sisa TUP yang harus disetor senilai Rp980.664,00 menggunakan Akun 815511 sesuai NTPN 6C5B81GCAN0HUFMN3 tanggal bayar 31 Desember 2024;
- Sisa TUP sumber Dana PNBPN Senilai Rp109.652.060,00 dengan SPM PTUP Nihil nomor 00524A tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp98.050.250,00 Sehingga nilai Sisa TUP yang harus disetor senilai Rp11.601.810,00 menggunakan Akun 815513 sesuai NTPN 649285UFPRRSFVFNN tanggal bayar 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

31 Desember 2024

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		2.580,	72.050.805.432,	(62.233.744.787,)	(3.044.616.864,)	(65.278.361.651,)	6.772.443.781,
30103	ALAT BANTU	-	16,	2.267.741.883,	(1.445.882.076,)	(298.623.762,)	(1.744.505.838,)	523.236.045,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	49,	7.677.514.545,	(7.513.029.852,)	(122.126.617,)	(7.635.156.469,)	42.358.076,
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	30,	267.765.300,	(156.421.540,)	(26.776.530,)	(183.198.070,)	84.567.230,
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6,	1.136.094.531,	(1.042.908.779,)	(93.185.752,)	(1.136.094.531,)	0,
30303	ALAT UKUR	-	29,	3.880.652.211,	(3.930.512.211,)	93.090.000,	(3.837.422.211,)	43.230.000,
30501	ALAT KANTOR	-	383,	5.683.722.419,	(4.719.627.046,)	(679.409.630,)	(5.399.036.676,)	284.685.743,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1.261,	16.834.701.937,	(14.648.755.687,)	(1.647.931.743,)	(16.296.687.430,)	538.014.507,
30601	ALAT STUDIO	-	51,	2.074.786.718,	(2.067.932.922,)	147.273.059,	(1.920.659.863,)	154.126.855,
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	100,	2.565.819.240,	(2.292.281.586,)	(156.937.654,)	(2.449.219.240,)	116.600.000,
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8,	6.816.116.238,	(4.192.122.098,)	(477.317.844,)	(4.669.439.942,)	2.146.676.296,
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	141,	253.660.000,	(255.860.000,)	2.200.000,	(253.660.000,)	0,
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	3,	90.673.000,	(69.399.000,)	(8.509.600,)	(77.908.600,)	12.764.400,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	30,	940.175.620,	(890.472.228,)	(4.396.468,)	(894.868.696,)	45.306.924,
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	6,	440.390.065,	(277.530.399,)	(29.260.825,)	(306.791.224,)	133.598.841,
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA	-	1,	212.878.237,	(63.863.469,)	(14.191.882,)	(78.055.351,)	134.822.886,
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1,	188.430.000,	(188.430.000,)	0,	(188.430.000,)	0,
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4,	1.349.642.811,	(417.892.839,)	(76.976.188,)	(494.869.027,)	854.773.784,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	-	8,	2.847.644.616,	(2.465.935.500,)	(133.293.462,)	(2.599.228.962,)	248.415.654,
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	2,	495.494.500,	(495.494.500,)	0,	(495.494.500,)	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	30,	2.397.355.616,	(2.385.840.616,)	11.795.000,	(2.374.045.616,)	23.310.000,
31001	KOMPUTER UNIT	-	251,	4.645.999.300,	(4.803.251.219,)	476.288.794,	(4.326.962.425,)	319.036.875,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	130,	2.337.011.080,	(2.358.639.528,)	157.693.277,	(2.200.946.251,)	136.064.829,
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2,	19.525.000,	(19.525.000,)	0,	(19.525.000,)	0,
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1,	168.464.362,	(75.808.962,)	(16.846.436,)	(92.655.398,)	75.808.964,
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	-	1,	870.100.000,	(870.100.000,)	0,	(870.100.000,)	0,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	12,	5.279.370.439,	(4.225.847.610,)	(215.133.894,)	(4.440.981.504,)	838.388.935,
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	2,	8.635.000,	(66.333.438,)	57.825.625,	(8.507.813,)	127.187,
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	-	0,	0,	(69.212.000,)	69.212.000,	0,	0,
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	22,	300.440.764,	(224.834.682,)	(59.076.332,)	(283.911.014,)	16.529.750,
133111	Gedung dan Bangunan		39,	102.005.296.172,	(7.790.994.321,)	(2.046.380.040,)	(9.837.374.361,)	92.167.921.811,
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5,	86.668.217.013,	(6.014.502.984,)	(1.725.171.980,)	(7.739.674.964,)	78.928.542.049,
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	32,	14.167.436.680,	(1.671.223.512,)	(297.815.210,)	(1.969.038.722,)	12.198.397.958,
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2,	1.169.642.479,	(105.267.825,)	(23.392.850,)	(128.660.675,)	1.040.981.804,
134111	Jalan dan Jembatan		732,	159.926.000,	(159.926.000,)	0,	(159.926.000,)	0,
50101	JALAN	-	732,	159.926.000,	(159.926.000,)	0,	(159.926.000,)	0,
134112	Irigasi		10,	285.511.050,	(46.395.570,)	(7.137.780,)	(53.533.350,)	231.977.700,
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	10,	285.511.050,	(46.395.570,)	(7.137.780,)	(53.533.350,)	231.977.700,
134113	Jaringan		2,	316.739.225,	(72.725.200,)	(9.812.816,)	(82.538.016,)	234.201.209,
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1,	227.320.225,	(49.252.712,)	(7.577.341,)	(56.830.053,)	170.490.172,
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1,	89.419.000,	(23.472.488,)	(2.235.475,)	(25.707.963,)	63.711.037,
135121	Aset Tetap Lainnya		6,	24.145.000,	(20.350.000,)	0,	(20.350.000,)	3.795.000,
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	6,	24.145.000,	(20.350.000,)	0,	(20.350.000,)	3.795.000,
JUMLAH			3.369,	174.842.422.879,	(70.324.135.878,)	(5.107.947.500,)	(75.432.083.378,)	99.410.339.501,

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
FUNGSI : 04 EKONOMI
SUB FUNGSI : 04.08 TRANSPORTASI
PROGRAM : 022.05.GA PROGRAM INFRASTRUKUR KONEKTIVITAS
LOKASI : 22 BALI

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1960	Pelayanan Transportasi Udara								
BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	1.167.949.000	1.072.338.848	91,81	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	706.810.000	563.957.700	79,79	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
	Subtotal	1.874.759.000	1.636.296.548	87,28					
4565	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara								
BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	1.307.676.000	1.234.444.618	94,40	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	879.947.000	669.780.650	76,12	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
CBE.004	Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	4.151.038.000	4.141.800.860	99,78	1	0	Unit	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Unit.
	Subtotal	6.338.661.000	6.046.026.128	95,38					
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara								
BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	1.551.421.000	1.487.911.789	95,91	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	922.801.000	643.383.748	69,72	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.003	Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1.777.845.000	1.711.760.428	96,28	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.004	Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	722.519.000	324.960.048	44,98	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIF.005	Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	1.379.546.000	1.326.499.703	96,15	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
BIF.006	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	590.981.000	186.824.400	31,61	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
	Subtotal	6.945.113.000	5.681.340.116	81,80					
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara								
EBA.956	Layanan BMN	174.300.000	40.964.322	23,50	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
EBA.994	Layanan Perkantoran	26.265.037.000	26.195.661.219	99,74	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	273.640.000	154.734.000	56,55	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.733.000.000	3.676.581.159	98,49	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
	Subtotal	30.445.977.000	30.067.940.700	98,76					
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara								
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.491.442.000	1.297.605.984	87,00	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
	Subtotal	1.491.442.000	1.297.605.984	87,00					
4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama								
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	350.260.000	344.079.069,00	98,24	1	1	Layanan	100,00	s.d Desember 2024 progres mencapai 100% dengan realisasi RO 1 Layanan.
	Subtotal	350.260.000	344.079.069	98,24					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)*	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	47.446.212.000	45.073.288.545	95,00					

* Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

LAMPIRAN

UTAMA

(Neraca, LRA, LO, LPE)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	179,891,024	343,035,494	(163,144,470)	(47.56)
JUMLAH ASET LANCAR	179,891,024	343,035,494	(163,144,470)	(47.56)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	72,050,805,432	73,000,216,651	(949,411,219)	(1.30)
Gedung dan Bangunan	102,005,296,172	98,510,220,312	3,495,075,860	3.55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	762,176,275	762,176,275	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	24,145,000	126,182,000	(102,037,000)	(80.86)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(75,432,083,378)	(70,324,135,878)	(5,107,947,500)	7.26
JUMLAH ASET TETAP	99,410,339,501	102,074,659,360	(2,664,319,859)	(2.61)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,719,162,550	6,719,162,550	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	185,925,400	0	185,925,400	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(6,719,162,550)	(6,719,162,550)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	185,925,400	0	185,925,400	
JUMLAH ASET	99,776,155,925	102,417,694,854	(2,641,538,929)	(2.58)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	185,925,400	170,887,479	15,037,921	8.80
Pendapatan Diterima Dimuka	0	10,970,500	(10,970,500)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	185,925,400	181,857,979	4,067,421	2.24
JUMLAH KEWAJIBAN	185,925,400	181,857,979	4,067,421	2.24
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	99,590,230,525	102,235,836,875	(2,645,606,350)	(2.59)
JUMLAH EKUITAS	99,590,230,525	102,235,836,875	(2,645,606,350)	(2.59)
JUMLAH EKUITAS	99,590,230,525	102,235,836,875	(2,645,606,350)	(2.59)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	99,776,155,925	102,417,694,854	(2,641,538,929)	(2.58)

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV 465663

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,609,350,000	5,085,444,583	1,476,094,583	140.90	3,164,625,000	4,960,239,688	1,795,614,688	156.74
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,609,350,000	5,085,444,583	1,476,094,583	140.90	3,164,625,000	4,960,239,688	1,795,614,688	156.74
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,609,350,000	5,085,444,583	1,476,094,583	140.90	3,164,625,000	4,960,239,688	1,795,614,688	156.74
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	47,446,212,000	45,030,764,742	(2,415,447,258)	94.91	36,288,063,000	36,097,158,870	(190,904,130)	99.47
1. Belanja Pegawai	17,937,467,000	17,937,027,975	(439,025)	100.00	14,174,204,000	14,170,237,965	(3,966,035)	99.97
2. Belanja Barang	25,164,707,000	22,760,216,707	(2,404,490,293)	90.44	22,018,859,000	21,834,746,505	(184,112,495)	99.16
3. Belanja Modal	4,344,038,000	4,333,520,060	(10,517,940)	99.76	95,000,000	92,174,400	(2,825,600)	97.03
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
 SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV 465663

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
 Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	47,446,212,000	45,030,764,742	(2,415,447,258)	94.91	36,288,063,000	36,097,158,870	(190,904,130)	99.47
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Cecap Kurniawan
 NIP. 196901271996031002



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,955,273,083	4,932,239,065	23,034,018	0.467
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,955,273,083	4,932,239,065	23,034,018	0.467
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,955,273,083	4,932,239,065	23,034,018	0.467
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	17,880,157,852	14,227,108,088	3,653,049,764	25.677
Beban Persediaan	553,176,179	508,292,274	44,883,905	8.83
Beban Barang dan Jasa	7,366,730,367	7,320,049,588	46,680,779	0.638
Beban Pemeliharaan	3,713,787,574	4,056,771,167	(342,983,593)	(8.455)
Beban Perjalanan Dinas	11,175,649,701	10,218,564,349	957,085,352	9.366
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,895,802,919	8,899,322,509	(2,003,519,590)	(22.513)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	47,585,304,592	45,230,107,975	2,355,196,617	5.207
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,630,031,509)	(40,297,868,910)	(2,332,162,599)	5.787
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(89,764,000)	25,349,999	(115,113,999)	(454.099)
Pendapatan Pelepasan Aset	12,273,000	27,999,999	(15,726,999)	(56.168)
Beban Pelepasan Aset	102,037,000	2,650,000	99,387,000	3,750.453
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	128,869,000	624	128,868,376	20,651,983.33
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	129,094,600	624	129,093,976	20,688,137.17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	225,600	0	225,600	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	39,105,000	25,350,623	13,754,377	54.257
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(42,590,926,509)	(40,272,518,287)	(2,318,408,222)	5.757
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(42,590,926,509)	(40,272,518,287)	(2,318,408,222)	5.757

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

• Kuasa Pengguna Anggaran



Cecep Kurniawan

NIP. 196901271996031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	102,235,836,875	111,371,435,980	(9,135,599,105)	(8.2)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42,590,926,509)	(40,272,518,287)	(2,318,408,222)	5.76
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	39,945,320,159	31,136,919,182	8,808,400,977	28.29
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,645,606,350)	(9,135,599,105)	6,489,992,755	(71.04)
EKUITAS AKHIR	99,590,230,525	102,235,836,875	(2,645,606,350)	(2.59)

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Cecep Kumiawan

NIP. 196901271996031002

LAMPIRAN

TAMBAHAN

(Neraca Awal, Neraca Percobaan dan LRA Per Akun)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

UNIT ORGANISASI : 05

WILAYAH/PROVINSI : 2200

SATUAN KERJA : 465663

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

BALI

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl. Cetak 06/05/2025 10:37 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	332,227,022	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,808,472	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	73,000,216,651	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	98,510,220,312	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	159,926,000	0
0.0	134112	Irigasi	285,511,050	0
0.0	134113	Jaringan	316,739,225	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	126,182,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	62,233,744,787
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,790,994,321
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	159,926,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	46,395,570
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	72,725,200
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	20,350,000
0.0	162151	Software	6,719,162,550	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,719,162,550
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	56,870,123
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	114,017,356
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	10,970,500
0.0	391111	Ekuitas	0	102,235,836,875
JUMLAH			179,460,993,282	179,460,993,282

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	169,124,288	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,766,736	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	72,050,805,432	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	102,005,296,172	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	159,926,000	0
0.0	134112	Irigasi	285,511,050	0
0.0	134113	Jaringan	316,739,225	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,145,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	65,278,361,651
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,837,374,361
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	159,926,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	53,533,350
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	82,538,016
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	20,350,000
0.0	162151	Software	6,719,162,550	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	185,925,400	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,719,162,550
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	185,925,400
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	45,030,764,742
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,085,444,583	0
0.0	391111	Ekuitas	0	102,235,836,875
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,273,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	70,043,083
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	4,860,180,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	25,050,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	128,684,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	225,600
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,603,710,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	85,193	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	361,880,860	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	105,252,932	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	108,220,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	32,613,117	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	290,036,730	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	600,227,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	275,280,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	48,054,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	911	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,086,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,659,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	242,702,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	10,109,741,384	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	70,388,325	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,413,563,855	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19,976,115	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	174,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103,368,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	519,700,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	420,332,985	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	592,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,066,510,504	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,286,922,662	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,566,942	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	192,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439,338,520	0
3.0	522141	Beban Sewa	414,534,784	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	83,750,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,189,482,280	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	189,042,990	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,335,220,568	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8,157,715,033	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	309,730,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,917,088,770	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	784,387,050	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6,728,848	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,832,472,283	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,046,380,040	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,137,780	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,812,816	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	553,176,179	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	41,736	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	225,600	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	102,037,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:36 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			234,700,413,628	234,700,413,628

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Cecep Kurniawan
NIP. 196901271996031002



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	45,030,764,742
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,085,444,583	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,273,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	59,072,583
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	4,860,180,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	25,050,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	128,684,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,603,710,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87,996	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361,880,860	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	105,252,932	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	108,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,120,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	32,613,117	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	290,036,730	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	645,112,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	275,650,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	48,054,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	911	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,086,300	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,659,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	242,702,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	10,121,726,507	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	70,388,325	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,413,563,855	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19,976,115	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	174,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	103,368,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	519,700,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	420,332,985	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	592,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,066,510,504	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	390,073,445	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,400,940,018	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,566,942	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	192,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 10:35 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439,338,520	0
3.0	522141	Belanja Sewa	414,534,784	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	83,750,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,189,482,280	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	189,042,990	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,335,220,568	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,199,866,033	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309,730,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,917,088,770	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	784,387,050	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6,728,848	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	838,444,200	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,495,075,860	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,803
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	42,151,000
JUMLAH			50,158,733,128	50,158,733,128

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Cecap Kurniawan
NIP. 196901271996031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,072,587,000	5,603,712,000	5,603,710,100	0	5,603,710,100	100	1,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,000	90,000	87,996	2,803	85,193	94.66	4,807
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	316,400,000	361,882,000	361,880,860	0	361,880,860	100	1,140
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	96,600,000	105,254,000	105,252,932	0	105,252,932	100	1,068
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	110,670,000	108,220,000	108,220,000	0	108,220,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	12,960,000	15,120,000	15,120,000	0	15,120,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,850,000	32,615,000	32,613,117	0	32,613,117	99.99	1,883
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	240,000,000	290,037,000	290,036,730	0	290,036,730	100	270
511129	Belanja Uang Makan PNS	660,000,000	645,112,000	645,112,000	0	645,112,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	235,200,000	275,650,000	275,650,000	370,000	275,280,000	99.87	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,751,339,000	7,437,692,000	7,437,683,735	372,803	7,437,310,932	99.99	381,068
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	48,055,000	48,054,000	0	48,054,000	100	1,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,000	911	0	911	30.37	2,089
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,087,000	1,086,300	0	1,086,300	99.94	700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	7,659,000	7,659,000	0	7,659,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	64,904,000	64,900,211	0	64,900,211	99.99	3,789
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	227,040,000	242,702,000	242,702,000	0	242,702,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	227,040,000	242,702,000	242,702,000	0	242,702,000	100	0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9,544,000,000	10,121,780,000	10,121,726,507	0	10,121,726,507	100	53,493
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	70,389,000	70,388,325	0	70,388,325	100	675
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	9,544,000,000	10,192,169,000	10,192,114,832	0	10,192,114,832	100	54,168
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,522,379,000	17,937,467,000	17,937,400,778	372,803	17,937,027,975	100	439,025
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,198,841,000	2,433,520,000	2,413,563,855	0	2,413,563,855	99.18	19,956,145
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,000,000	20,000,000	19,976,115	0	19,976,115	99.88	23,885
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,218,000	965,000	174,000	0	174,000	18.03	791,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	951,540,000	104,424,000	103,368,000	0	103,368,000	98.99	1,056,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	473,600,000	519,714,000	519,700,000	0	519,700,000	100	14,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,647,199,000	3,078,623,000	3,056,781,970	0	3,056,781,970	99.29	21,841,030
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	622,543,000	484,888,000	420,332,985	0	420,332,985	86.69	64,555,015
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	202,200,000	593,460,000	592,800,000	0	592,800,000	99.89	660,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	950,145,000	1,431,825,000	1,066,510,504	0	1,066,510,504	74.49	365,314,496
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,774,888,000	2,510,173,000	2,079,643,489	0	2,079,643,489	82.85	430,529,511
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	330,000,000	392,280,000	390,073,445	0	390,073,445	99.44	2,206,555
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	330,000,000	392,280,000	390,073,445	0	390,073,445	99.44	2,206,555
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,320,000,000	1,410,632,000	1,400,940,018	0	1,400,940,018	99.31	9,691,982
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	6,000,000	5,566,942	0	5,566,942	92.78	433,058
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	696,000	192,000	0	192,000	27.59	504,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	456,000,000	456,000,000	439,338,520	0	439,338,520	96.35	16,661,480
522141	Belanja Sewa	195,600,000	416,640,000	414,534,784	0	414,534,784	99.49	2,105,216
522151	Belanja Jasa Profesi	30,000,000	97,460,000	83,750,000	0	83,750,000	85.93	13,710,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,025,600,000	2,387,428,000	2,344,322,264	0	2,344,322,264	98.19	43,105,736
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,905,720,000	2,195,137,000	2,189,482,280	0	2,189,482,280	99.74	5,654,720
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	180,000,000	190,000,000	189,042,990	0	189,042,990	99.5	957,010
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,307,971,000	1,352,862,000	1,335,220,568	0	1,335,220,568	98.7	17,641,432
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,393,691,000	3,737,999,000	3,713,745,838	0	3,713,745,838	99.35	24,253,162
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,068,717,000	8,621,470,000	8,199,866,033	42,151,000	8,157,715,033	94.62	463,754,967
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	285,150,000	328,457,000	309,730,000	0	309,730,000	94.3	18,727,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,434,971,000	2,538,250,000	1,917,088,770	0	1,917,088,770	75.53	621,161,230
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	310,000,000	790,656,000	784,387,050	0	784,387,050	99.21	6,268,950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,098,838,000	12,278,833,000	11,211,071,853	42,151,000	11,168,920,853	90.96	1,109,912,147
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,589,429,000	779,371,000	6,728,848	0	6,728,848	0.86	772,642,152
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,589,429,000	779,371,000	6,728,848	0	6,728,848	0.86	772,642,152
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,859,645,000	25,164,707,000	22,802,367,707	42,151,000	22,760,216,707	90.44	2,404,490,293

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193,000,000	847,902,000	838,444,200	0	838,444,200	98.88	9,457,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	193,000,000	847,902,000	838,444,200	0	838,444,200	98.88	9,457,800
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,930,000,000	3,496,136,000	3,495,075,860	0	3,495,075,860	99.97	1,060,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,930,000,000	3,496,136,000	3,495,075,860	0	3,495,075,860	99.97	1,060,140
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,123,000,000	4,344,038,000	4,333,520,060	0	4,333,520,060	99.76	10,517,940
	JUMLAH BELANJA	42,505,024,000	47,446,212,000	45,073,288,545	42,523,803	45,030,764,742	94.91	2,415,447,258

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/25 10:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,273,000	0	12,273,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	66,600,000	59,072,583	0	59,072,583	88.7
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	66,600,000	71,345,583	0	71,345,583	107.13
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	3,506,500,000	4,860,180,000	0	4,860,180,000	138.6
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	36,250,000	25,050,000	0	25,050,000	69.1
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	3,542,750,000	4,885,230,000	0	4,885,230,000	137.89
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000	0	185,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	128,684,000	0	128,684,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	128,869,000	0	128,869,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,609,350,000	5,085,444,583	0	5,085,444,583	140.9
	JUMLAH PENDAPATAN	3,609,350,000	5,085,444,583	0	5,085,444,583	140.9